

TAJUK RENCANA

Pengawasan Orangtua terhadap Anak

MIRIS, melihat anak-anak usia pelajar berkelir di jalan sembari membawa senjata tajam. Tak hanya itu, mereka juga membawa minuman keras (miras). Fenomena ini selayaknya jangan dianggap lumrah, apalagi terjadi di daerah yang dikenal sebagai kota budaya dan kota pendidikan. Masa depan anak-anak harus diselamatkan, jangan biarkan mereka terjerumus ke dunia kekerasan yang membahayakan keselamatan diri serta orang lain.

Beberapa hari lalu tim gabungan terdiri Polres, Kodim 0730, Dinas Perhubungan Gunungkidul menggelar razia di Jalur Jalan Lintas Selatan (JLJS) Tangjungsari terhadap sekelompok pelajar SMP berjumlah 50 orang. Dari hasil razia itu itu petugas menemukan senjata tajam berupa clurit, ruyung, serta minuman keras jenis cium sebanyak 2,5 liter. Ternyata, menurut petugas, mereka adalah pelajar SMP dari kabupaten Sleman (KR 24/1).

Ketika dimintai keterangan, mereka menjawab hendak berwisata ke Pantai Sepanjang Tangjungsari. Sebelumnya, warga merasa curiga dengan arak-arakan pelajar tersebut yang memenuhi badan jalan dan berpotensi menimbulkan kegaduhan. Untuk itulah warga kemudian melapor ke aparat keamanan.

Kita tentu tidak mempersoalkan pelajar yang hendak berwisata ke Pantai Sepanjang, melainkan mempersoalkan mengapa mereka membawa senjata tajam dan minuman keras. Untung petugas cepat bergerak setelah mendapat laporan masyarakat, sehingga berbagai kemungkinan negatif dapat diantisipasi.

Kita masih ingat peristiwa beberapa waktu lalu di sebuah sekolah di Sleman, beberapa pelajar kedatangan membawa dan

mengonsumsi miras. Sungguh ironis, karena itu terjadi justru di lingkungan sekolah yang notabene sebagai tempat pengemblengan mental dan ilmu kalangan generasi penerus. Kalau sekolah saja sudah tidak steril miras, rasanya sangat berat untuk melakukan pengawasan pelajar di luar sekolah.

Hemat kita, fenomena di atas adalah alarm bagi para orangtua, pendidik maupun masyarakat pada umumnya. Membawa senjata tajam serta minuman keras sesungguhnya sudah masuk kategori pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Sejauh ini, aparat kepolisian 'hanya' melakukan pembinaan. Orang tua siswa dipanggil kemudian diberi pengarahan, setelah itu dilepas dan tak ada jaminan anak tersebut insyaf.

Padahal, kalau hendak menerapkan hukum secara ketat, membawa senjata tajam di tempat umum sudah masuk kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Darurat No 12 Tahun 1951. Namun sejauh ini aparat lebih banyak bersikap persuasif dan menggunakan langkah diversifikasi, yakni tidak memproses melalui jalur hukum, melainkan lewat jalur kekeluargaan.

Sayangnya, langkah tersebut tak membuat anak insyaf dan berpotensi mengulangi perbuatannya. Kita mendesak polisi mengambil langkah lebih tegas lagi agar mereka jera. Selain itu, tak kalah pentingnya adalah pengawasan orangtua. Mengapa mereka membiarkan anak-anaknya berkelir di jalan dengan membawa senjata tajam? Jadi, membina anak yang terlibat tindak pidana tidaklah cukup, melainkan harus dibarengi dengan membina orangtua karena telah abai dan membiarkan anaknya berkelir di jalan sembari membawa senjata tajam. □-d

'Isi Piringku' untuk Cegah Stunting

MEMPERINGATI Hari Gizi Nasional (HGN) merupakan momen penting untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat sadar akan pentingnya peranan gizi dalam membangun generasi bangsa. Tema yang diusung pada peringatan HGN ke-63 pada 25 Januari 2023 adalah: Cegah Stunting dengan Protein Hewani.

Menurut World Health Organization, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Stunting berdampak panjang pada kesehatan anak bahkan memperlambat pertumbuhan dan perkembangan otak serta jaringan penting lainnya. Sehingga anak stunting berisiko memiliki kemampuan kognitif yang rendah, dan mengalami penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, serta obesitas pada saat dewasa.

Di Indonesia stunting masih menjadi prioritas masalah gizi dan kesehatan yang perlu diselesaikan. Berbagai upaya sudah dilakukan. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan prevalensi stunting turun dari 36,8% pada tahun 2007 menjadi 30,8% pada tahun 2018. Selain itu Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019 dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menunjukkan prevalensi stunting juga menurun dari 27,7% di tahun 2019 menjadi 24,4% pada tahun 2021. Namun upaya ini perlu dikuatkan lagi agar percepatan penurunan prevalensi stunting mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah yaitu 14% pada tahun 2024.

Proses Panjang

Kejadian stunting merupakan proses yang panjang. Periode 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) merupakan masa penting dalam pencegahan stunting, dimulai dari masa konsepsi/pembuahan, kehamilan, bayi lahir hingga anak menginjak usia 24 bulan. Pada masa awal ke-

Siti Budi Utami

hidupan tersebut pembentukan, pertumbuhan dan perkembangan otak serta organ vital sedang terjadi. Kecukupan asupan gizi pada masa tersebut menjadi faktor penting dalam pencapaian pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Salah satu zat gizi tersebut adalah protein.

Beberapa penelitian menemukan kecukupan konsumsi protein hewani menjadi



sapi. Zat gizi tersebut berperan penting dalam diferensiasi sel sebagai proses pertumbuhan jaringan dan perkembangan kognitif. Oleh karena itu asupan protein hewani selama periode 1000 HPK pada wanita hamil, ibu menyusui, bayi yang telah mendapatkan MP-ASI penting untuk dicukupi.

Terhitung Kurang

Di Indonesia, konsumsi sumber protein hewani masih terhitung kurang. Studi Diet Total tahun 2014 menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga penduduk Indonesia memiliki tingkat kecukupan protein sangat kurang, yaitu asupan protein hariannya < 80% dari Angka Kecukupan Protein yang dianjurkan. Parahnya hampir separuh dari balita dan ibu hamil memiliki asupan protein yang juga sangat kurang.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu menerapkan pedoman 'Isi Piringku'. Selain itu, perlu juga perhatian khusus pada periode 1000 HPK, baik pada ibu hamil, ibu menyusui maupun balita yang memerlukan tambahan protein yang utamanya bersumber pada protein hewani. Dengan demikian, kebutuhan seluruh zat gizi khususnya protein dapat terpenuhi setiap hari. Asupan gizi yang cukup pada setiap jenjang usia diharapkan dapat mencegah terjadinya stunting. □-d

*) **Siti Budi Utami SgZ MPH**, Dosen Jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkannya fotocopy identitas. Terimakasih.

Demi Kesatuan dan Rekonsiliasi

"Not everybody will happy with the report..." (Desmond Tutu dalam Piet Miering 2002:80)

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah memberi pengakuan pelanggaran HAM berat di masa lalu setelah menerima laporan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM di Istana negara Rabu (11/1) lalu (KR, 12/1). Presiden mengatakan, "Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa, dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat." Presiden juga menaruh simpati dan empati mendalam pada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM pada masa lalu, serta berjanji untuk memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana. Ia juga berharap bahwa pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa depan.

Namun demikian, yang terjadi seperti dikatakan Desmond Tutu sewaktu menyerahkan laporan akhir sebagai Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau *Truth and Reconciliation Commission* (TRC) di Afrika Selatan kepada Presiden Nelson Mandela, "Tidak setiap orang akan puas dengan laporan ini...." Kemudian Nelson Mandela pun memberi jawaban yang sangat mengagumkan, "Saya terima laporan ini apa adanya, sebagai sumbangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) bagi rekonsiliasi dan pembangunan bangsa kita. Marilah kita terima tanggung jawab kita untuk membangun masa depan negara kita yang lebih baik."

Mungkin sudah waktunya kita meniru jawaban Nelson Mandela tersebut, "Mari kita masa depan negeri kita yang lebih baik."

Agus Tridiatno

Uang Silih

Belajar dari Afrika Selatan, TRC telah bekerja keras untuk menguak kebenaran pelanggaran HAM Pemerintahan Apartheid yang terjadi selama 34 tahun. Antara 1 Maret 1960 - 10 Mei 1994, termasuk dengan melakukan 2.000 kali *public hearings* (mendengarkan kesaksian terbuka). Hasil-hasil nyata pun dilaporkan. Misal: ditemukan korban sebanyak 28.750, pelanggaran HAM berat sebanyak 36.935, dan yang dianggap pelanggaran berat (*gross and associated violations*) sebanyak 46.696, serta 172 proposal amnesti disetujui dari 7.000 permohonan amnesti.

TRC juga mengusulkan uang silih dan rehabilitasi bagi korban R17.000 - R21.000 (sekitar Rp 14.961.870 - Rp 18.482.310) per orang setiap tahun selama enam periode setiap periode enam tahun. Meskipun begitu, kritik dan ketidakpuasan banyak dilonarkan pula. Misalnya: pembentukan TRC lebih merupakan kompromi politik, rekonsiliasi dan rehabilitasi korban diutamakan dari pada menemukan kebenaran. Pemberian amnesti bagi pelaku pelanggaran dianggap lebih cepat diberikan dari pada santunan untuk korban.

Betapapun, TRC mendapat pujian internasional. TRC memberi sumbangan sangat besar dalam membangun Afrika Selatan menjadi negara yang lebih baik. TRC juga memberi contoh banyak negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Dalam hal ini dua tokoh berperan sangat penting yaitu Nelson Mandela dan Desmond Tutu. Dua

pemimpin ini mengutamakan pemaafan dan rekonsiliasi demi kesatuan negara dari pada menyimpan dendam masa lalu. Nelson Mandela yang dipenjara selama 27 tahun dengan rela hati melepaskan dendamnya demi masa depan Afrika Selatan yang lebih baik.

Satu Langkah

Presiden Jokowi sudah satu langkah maju menuju penyelesaian pelanggaran HAM berat, meski banyak pihak belum puas dan masih meragukan komitmen pemerintah. Memang sangatlah bagus usaha pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM terus dikawal secara kritis.

Namun, belajar dari Afrika Selatan, mengupayakan rekonsiliasi dan mempertahankan kesatuan akan lebih baik. Pemaafan dan belas kasih harus diutamakan dari pada kebencian dan dendam. □-d

*) **Dr. Agus Tridiatno**, Dosen Universitas Atma Jaya, alumnus ICRS dengan disertasi tentang 'forgiveness'.

Pojok KR

Rombongan pelajar SMP dirazia di JLJS, bawa clurit dan miras.

-- Bukan gambaran umum pelajar DIY.

Sambo bantah pernah rencanakan pembunuhan.

-- Namanya pembelaan, wajar minta diringankan.

Penghitungan kemiskinan harus objektif. -- Untuk DIY perlu penghitungan ulang.

Beraksi

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com

0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak beres ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Pelajaran dari Penangkapan Teroris

SLEMAN itu bisa dikatakan wilayah padat penduduk. Kawasan memang terbagi ada yang terasa kota namun banyak yang terasa pedesaan. Dan yang pasti banyak perumahan (mewah) dan tempat kost (eksklusif). Di perumahan yang jenis ini kadangkala hubungan ketetangga menjadi tidak maksimal. Karena kurangnya pergaulan social, apalagi jika warganya adalah pasangan yang bekerja di luar rumah.

Namun terkait penangkapan terduga teroris di Kalurahan Pandowoharjo Sleman beberapa waktu lalu memang mengejutkan. Lima tahun kos di Sleman Utara menjadi paham. Pandowoharjo masih di kawasan atau daerah yang suasana pedesaan dan biasanya kondisinya cukup ramah dengan lingkungan. Menjadi

pertanyaan, jika sosok tersebut orang yang baru kontrak atau kos, apakah tidak ada laporan orang baru tinggal? Karena sekarang ini laporan ke RT/RW terkesan kurang dari mereka yang kontrak/kos atau juga pemilik rumah kontrak/kos.

Lepas dari apapun semua, mungkin ini bisa menjadi pelajaran semua pihak terutama perangkat wilayah yang terendah, RT/RW, di manapun. Karena kendornya pengawasan memang bisa berakibat fatal. Bisa saja masuk teroris, penjahat narkoba atau bahkan penjahat kelamin termasuk predator anak. Jaga tangga di Jawa Tengah dan jaga warga di DIY memang perlu dimaksimalkan. Kita semua tidak boleh lengah dengan penyusupan penyusupan. Sikap gubuh harus dikembalikan. □-d

Pembaca KR, 08222018xxx

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifah, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Keuhmans. **Fotografer:** Eddy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafiis:** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'...Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifulhah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyuwangi: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd, Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragi Dedy TP